

KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C a L K)

TAHUN ANGGARAN 2017



LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2017.

Kecamatan Lunang telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2016, sesuai dengan Permendagri No. 13/2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka disusunlah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang.

Lunang , 31 Desember 2017

**CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MUKHTAR IS, SE
NIP. 19680611 199303 1 006

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Maksud dan Tujuan	3
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	6
2.1.	Ekonomi Makro	6
2.2.	Kebijakan Keuangan	7
2.3.	Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD.....	7
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
3.2.	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	11
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1.	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	12
4.2.	Basis Akuntansi	13
4.3.	Basis Pengukuran	13
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi	14
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	15
5.1.	Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	15
5.2.	Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang Timbul	16

BAB VI	P E N U T U P	20
6.1.	Kesimpulan	20
6.2	Saran	20
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SKPD		21
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

B A B I

P E N D A H U L U A N

Dengan perkembangan dan kemajuan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan dampak akan kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Perkembangan dan kemajuan tersebut juga memberikan gambaran mengenai potensi Daerah, dukungan dan kemajuan untuk melaksanakan Otonomi Daerah.

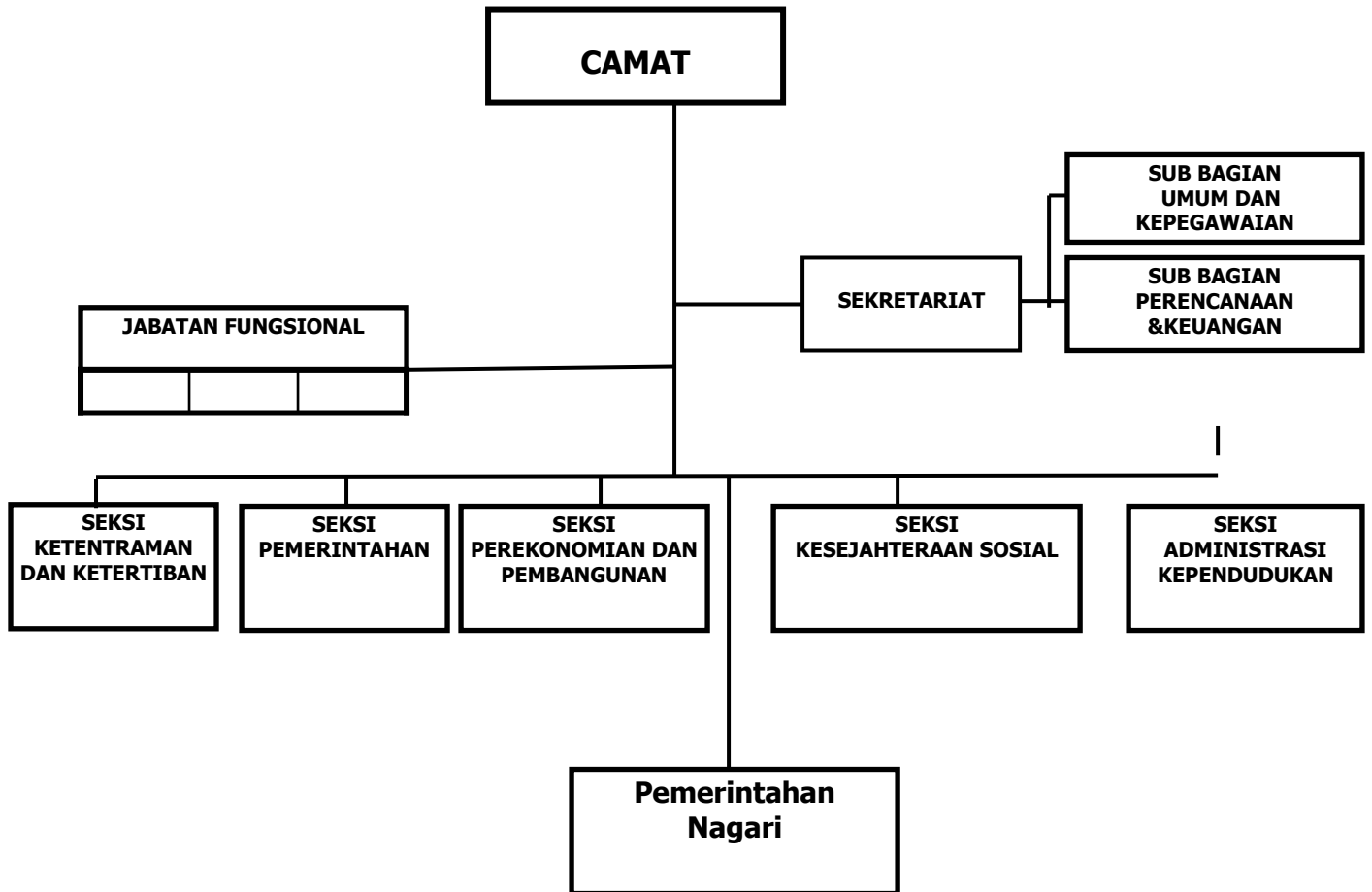
Kemudian, untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan kecamatan serta dengan memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lunang.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Lunang meliputi 10 nagari, yaitu :

1. Pemerintahan Nagari Lunang Utara.
2. Pemerintahan Nagari Pondok Parian Lunang.
3. Pemerintahan Nagari Lunang Tengah.
4. Pemerintahan Nagari Lunang .
5. Pemerintahan Nagari Lunang Satu.
6. Pemerintahan Nagari Lunang Barat.
7. Pemerintahan Nagari Lunang Selatan.
8. Pemerintahan Nagari Lunang Dua.
9. Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.
10. Pemerintahan Nagari Sindang Lunang.

Struktur Organisasi Kecamatan Lunang Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut ;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu ***Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.***

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target
Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi

4.3. Basis Pengukuran

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

B A B II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah diharapkan mampu dilaksanakan secara optimal dengan beberapa langkah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu Kebijakan Aspek Belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input Dana = Rp. 5.000.000,-

Target Kinerja = 1. Terlatihnya beberapa orang Aparatur Kecamatan Lunang.

2. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kecamatan Lunang.

Keberhasilan = Terciptanya Efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan, baik administrasi keuangan, Maupun Teknis Di lapangan.

B A B III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efesiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

	Uraian	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<u>262.537.500</u>	<u>262.453.697</u>	100 %
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	6.800.000	6.716.354	100%
		-		
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.100.000	26.100.000	100%
		-		
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.572.800	2.572.800	100%
		-		
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.821.600	9.821.600	100%
		-		
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.518.100	5.518.000	100%
		-		
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.900.000	1.900.000	100%
		-		
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	100%
		-		

8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.225.000	13.225.000	100 %
		-		
9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	39.300.000	39.299.963	99 %
		-		
10.	Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	126.400.00	126.400.00	100 %
		-		
11	Penyediaan Jasa Publikasi	1.000.000	1.000.000	100 %
12	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	26.000.000	26.000.000	100 %
13	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	2.700.000	2.700.000	100 %
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	109.745.200	107.472.800	99 %
14	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	37.400.000	35.400.000	94,65 %
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	28.261.000	28.261.000	100 %
		-		
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12.000.000	12.000.000	100 %
		-		
17	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	28.584.000	28.311.800	99,90 %
		-		
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3.500.000	3.500.000	100 %
		-		
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000	5.000.000	100 %
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	5.000.000	100 %

D.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.249.400	3.249.400	100%
20	Penyusunan Laporan AKIP SKPD	3.249.400	3.249.400	100%
		-		
E.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	31.420.000	31.420.000	100%
17.	Pelaksanaan HUT RI	31.420.000	31.420.000	100%
F.	Program pelayanan dan Rehabilitas Sosial	3.000.000	3.000.000	100%
18.	Distribusi Raskin	3.000.000	3.000.000	100%
G.	Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata	9.712.000	9.712.000	100%
19.	Pergelaran seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festifal Langkisau	9.712.000	9.712.000	100%
		-		
H.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari	21.152.000	21.112.490	99%
20.	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintah nagari	21.152.000	21.112.490	99%
		-		
I.	PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	95.694.800	95.694.800	100%
21.	Pembinaan PKK Kecamatan	36.425.000	36.425.000	100%
		-		
22.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong	17.404.000	17.404.000	100%
		-		
23.	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	17.238.000	17.238.000	100%
		-		
24.	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	10.998.000	10.998.000	100%
		-		
25.	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	13.629.800	13.629.800	100%
		-		

J.	Program Penataan Administrasi Kepedudukan	4.012.000	4.012.000	100 %
26.	Penerbitan NIK Nasional dan Penetapan E-KTP	4.012.000	4.012.000	100 %
	J U M L A H	5545.622.900	543.127.187	99,98 %

3.2. Hambatan & Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah dilaksanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD. Dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah, memerlukan pemahaman lebih lanjut dari pihak yang terkait.

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun Program dan Kegiatan TA. 2017 Pada Kecamatan Lunang :

No	PROGRAM/KEGIATAN
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10	Rapat-rapat dan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11	Penyediaan jasa Publik
12	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
13	Penyusunan Rencana Strategis SKPD
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal

D		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	1	Penyusunan Laporan AKIP SKPD
E		Program pengembangan wawasan kebangsaan
	1	Pelaksanaan HUT RI
F		Program Pelayanan rehabilitas sosial
	1	Distribusi Raskin
G		Program Pembangunan pemasaran pariwisata
	1	Pergelaran seni budaya dan potensi daerah pada Festifal
H		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari
	1	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintah nagari
I		Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
	1	Pembinaan PKK Kecamatan
	2.	Pembinaan Bulan Bakti Gotong Royong
	3	Perencanaan Pembangunan Kecamatan
	4	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
	5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
J		Program Penataan Administrasi Kependudukan
	1	Penerbitan NIK Nasional dan penetapan E-KTP

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrua (Accrual Basis). Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan. Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus

diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah belum dilakukan penyusutan
BELUM SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegaskan dari Kepala Daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja yang dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran TA. 2016 yang Terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Dianggarkan Sebesar **Rp. 1.039.056.407,-** terealisasi **Rp. 983.105.204,-**

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG	1.039.056.407	983.105.204
Gaji dan Tunjangan	903.456.407	884.155.204
Tambahan Penghasilan PNS	135.600.000	98.950.000
BELANJA LANGSUNG	545.522.900	543.127.187
Honorarium PNS	26.100.000	26.100.000

Dari Data di atas diketahui bahwa terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp. 55.951.203,- Hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran dari gaji dan tunjangan sebesar Rp.19.301.203,- Dan sisa Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 15.300.000,-,

Untuk Belanja Langsung realisasinya adalah Rp. 2.395.713,- dan sisa anggaran Rp. 0,- hal ini disebabkan karena realisasi anggaran untuk belanja Komunikasi Dan Listrik ,Belanja Listrik sebesar Rp.83.648 dan Belanja Penggandaan sebesar, Rp. 100. Juga rapat-rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.37,00 Belanja Modal pengadaan Alat Kantor sebesar Rp.2.000.000,-, belanja surat tanda nomor kendaraan sebesar Rp. 272.400,- ,dan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi sebesar Rp. 39.510., terdapat kelebihan anggaran dari pagu yang telah terealisasikan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan Sebesar Rp. 369.591.120,- terealisasi sebesar Rp. ,-
Terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
<i>Belanja Bahan Habis Pakai</i>	<i>36.928.180</i>	<i>36.928.180</i>
<i>Belanja Jasa Kantor</i>	<i>18.486.354</i>	<i>18.486.354</i>
<i>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</i>	<i>28.311.800</i>	<i>28.311.800</i>
<i>Belanja Cetak dan Penggandaan</i>	<i>6.860.000</i>	<i>6.860.000</i>
<i>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</i>	<i>12.000.000</i>	<i>12.000.000</i>
<i>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</i>	<i>2.100.000</i>	<i>2.100.000</i>
<i>Belanja Makanan dan Minuman</i>	<i>54.725.000</i>	<i>54.725.000</i>
<i>Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>	<i>25.550.000</i>	<i>25.550.000</i>
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>233.115.453</i>	<i>233.115.453</i>
<i>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>Biaya Jasa Pihak Ketiga</i>	<i>27.800.000</i>	<i>27.800.000</i>
TOTAL	454.377.187	454.377.187

c. Belanja Modal

Untuk belanja modal Kecamatan Lunang menganggarkan Rp. 19.150.000,
Terealisasi sebesar Rp. 19.150.000,-
Terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Total Belanja Modal	19.150.000	19.150.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	33.000.000	33.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.150.000	6.150.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000	13.000.000

Belanja modal pada Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan telah terealisasi 100 % .

2. A s e t

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

a. Aset Lancar

Yang merupakan Kas Dibendahara Pengeluaran	Rp.	0,-
yang terdiri dari - Sisa UYHD	Rp.	0,-
- Hutang Pajak	Rp.	0,-

Kas di bendahara pengeluaran pada akhir triwulan IV tahun 2016 adalah Rp. 0,-. Karena sisa UYHD sebesar Rp.291.476,- sudah disetorkan pada kas daerah tanggal 21 Desember 2016 (bukti setoran terlampir) sehingga kas tidak ada di tangan bendahara pengeluaran Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Aset Tetap

- **Tanah**

Saldo awal tanah tahun 2017 Sebesar Rp. 76.702.416,-

Tidak ada penambahan asset tanah untuk tahun 2017.

- **Peralatan dan Mesin**

Saldo awal Peralatan Mesin tahun 2016 sebesar Rp. **428.736.546**

Ada penambahan mutasi Tahun 2017 sebesar Rp. **50.150.000**

Sehingga Peralatan dan Mesin Tahun 2017 Rp. **478.886.546**

- **Bangunan dan Gedung**

Saldo awal gedung dan bangunan tahun 2017 Rp. 1.190.525.000,-
sebesar

Tidak ada Penambahan mutasi Tahun 2017 sehingga bangunan dan gedung tahun 2017 Tetap.

- **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2017 Rp. 0,-
sebesar

- **Aset Tetap Lainnya**

Saldo awal Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tahun 2016 sebesar Rp. 0,-

- **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Saldo awal Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2017 sebesar Rp. 0,-

Mutasi Tahun 2016 sebesar Rp. 0,-

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos, untuk SKPD pos kewajiban-nya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran :

- a. R/K (K) BUD yaitu jumlah SP2D yang terbit selama satu tahun anggaran. Angka tersebut merupakan kalkulasi antara realisasi anggaran sebesar berapa nantinya ditambah dengan sisa UYHD kas bendahara pengeluaran sebesar berapa nantinya, yang akan disetor pada tanggal 31 Desember 2016, ditambah dengan setoran Contra Post.

4. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2017 kita mengkaji lebih Efektif dan Efisien melalui perhitungan surplus/defisit. Kecamatan Lunang merupakan kecamatan yang memiliki anggaran sendiri tahun 2017.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2017 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)
1	EKUITAS DANA LANCAR	1.338.700.240,00	1.338.700.240,00
	a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.338.700.240,00	1.338.700.240,00
	b. Cadangan Persediaan	0	0
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.696.593.129,00	1.696.593.129,00

B A B VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

1. Mengingat padatnya acara rapat dinas di Kabupaten maka alokasi anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2017 hanya bisa mencukupi sampai bulan November 2017 sehingga perjalanan dinas untuk bulan Desember 2017 tidak bisa di bayarkan dan terdapat kekurangan anggaran pada program dan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah ini, sementara untuk kegiatan lainnya berjalan lancar.

6.2. Saran

1. Peningkatan anggaran dimasa yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan tentang aturan pengelolaan keuangan daerah.

Lunang, 31 Desember 2017

CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah *Kecamatan Lunang* per 31 Desember 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2017 adalah Sbb :

- Anggaran	Rp. 1.584.579.307,-
- Jumlah SP2D	Rp. 1.547.582.391,-
- Jumlah Realisasi	Rp. 1.547.582.391,-
- Sisa UYHD	Rp. 0,-
- Contra Post	Rp. -,-

Lunang, 31 Desember 2017

CAMAT LUNANG



MUKHTAR IS, SE

NIP. 19680611 199303 1 006